

TATA KELOLA PERUSAHAAN
“Masalah Korupsi di Indonesia (Good Public Governance)”



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA
2018

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia di sekitar tahun 1997-1998, di mana Indonesia termasuk di dalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.

Dalam kasus-kasus yang terjadi kinerja perusahaan yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan menentukan perencanaan strategis. Faktor lain yang menyebabkan buruknya kinerja perusahaan adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya sogok-menyogok, suap-menyuap, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia maupun di negara lainnya.

Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk mengimbangnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem pengolahan dan pengendalian manajerial yang tepat dari masing-masing perusahaan. Dengan adanya GCG diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Tata kelola perbankan nasional memerlukan sistem manajemen perbankan nasional dalam memberikan acuan dan motivasi kepada bankir dalam mengelola usaha perbankan. Untuk itu diperlukan pula pengaturan dan pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan hati-hati, penuh integritas serta terhindar dari *moral hazard* para pengurusnya. Dengan demikian dunia perbankan dapat tumbuh secara mandiri dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan secara sinergis mampu mencapai kinerja yang optimal dalam mengemban visi dan misi perbankan nasional dalam mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah.

KASUS PERUSAHAAN YANG MENYIMPANG DARI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Apa itu GCG ? Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG / penerapan GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable.

Beberapa jabatan berikut ini sudah semestinya menguasai apa itu GCG / Good Corporate Governance, diantaranya: - Dewan Komisaris, - Direksi, - Corporate Secretary, - Komite Audit, - Komite GCG, - Bagian Legal dan Compliance, - Internal Audit perusahaan BUMN

& Swasta, · Dana Pensiun, · Yayasan/Koperasi, · Dan siapapun yang hendak mengimplementasikan GCG.

Prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance adalah sebagai berikut :

1. Transparansi Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stake holder (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Accountability Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Responsibility Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. Independensi Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan.

5. Fairness Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis kita.

Contoh kasus perusahaan yang menyimpang dari GCG: JAKARTA: Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jamsostek atas laporan keuangan 2011 dengan nilai di atas Rp7 triliun. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan dalam diskusi Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada empat temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jamsostek yang menyimpang dari aturan. Pertama, Jamsostek membentuk Dana Pengembangan Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22/2004.

Kedua, Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai Rp36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Ketiga, BPK menemukan Jamsostek belum menyelesaikan aset eks investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes (MTN). Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah eks jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai Rp72,25 miliar dan aset eks jaminan MTN PT Volgren Indonesia. Adapun temuan keempat dari BPK adalah masih terdapat beberapa kelemahan dalam

pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jamsostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek. Pertama, Jamsostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan program JHT. Kedua, Jamsostek belum efektif dalam mengelola data peserta JHT.

Ketiga, Jamsostek masih perlu membenahi sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung kehandalan data.

Keempat, Jamsostek belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepersertaan. Hal tersebut terlihat bahwa Jamsostek belum menjangkau seluruh potensi kepersertaan dan masih terdapatnya peserta perusahaan yang tidak patuh, termasuk BUMN.

Adapun Kelima, Jamsostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan JHT kepada 1,02 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo Rp1,86 triliun.

Analisis: Dari contoh kasus diatas merupakan kasus penyimpangan laporan keuangan 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek. Oleh karena itu menurut saya kasus seperti ini harus lah segera diselesaikan tentunya dengan cara pembenahan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Peristiwa ini yang diakibatkan karena kurang baiknya sistem good corporate governance, harapan agar dapat segera teratasi dan tidak dapat terulang kembali. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) juga harus dapat menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sehingga tercipta aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku.

Menurut Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) lembaga yang ditunjuk Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk melakukan penilaian tata kelola perusahaan menurut ASEAN Governance Scorecard: Sejumlah perusahaan BUMN terjerat kasus korupsi. Mulai dari PT PAL, PT Garam, hingga PT Askrindo terseret kasus rasuah yang menyebabkan pencopotan Direktur Utamanya.

Maraknya kasus korupsi di perusahaan milik negara tersebut dinilai karena kurang bagusnya tata kelola (good corporate governance/GCG) yang memenuhi standar internasional

Pada Tahun 2016, perusahaan yang dinilai IICD lebih dari 100 perusahaan publik di Indonesia dengan kapitalisasi market terbesar namun masih sedikit yang menerapkan GCG, termasuk dalam memerangi korupsi.

CONTOH KASUS:

Mantan Dirut Garuda Indonesia tersangka kasus dugaan korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia sebagai tersangka dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls Royce Inggris.

KPK juga menetapkan pendiri PT Mugi Rekso Abadi sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan Dirut Garuda tersebut dalam kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls Royce Plc kepada PT Garuda Indonesia. "Tersangka ESA diduga menerima suap dari tersangka SS dalam bentuk uang dan barang," ujar Wakil Ketua KPK. Laode M Syarif, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (19/1) sore.

Beberapa beberapa media di Indonesia melaporkan tersangka yang ditetapkan KPK sebagai Emirsyah Satar, yang menjabat Direktur Utama Garuda sejak Maret 2005 hingga mengundurkan diri pada Desember 2014. Menurut KPK, pendiri PT Mugi Rekso Abadi

yang disebut SS memberi suap kepada mantan Dirut Garuda itu dalam bentuk uang sebesar sekitar Rp20 miliar serta barang setara Rp 26,76 miliar yang tersebar di Indonesia dan Singapura.

Pemberian tersebut diduga untuk memenangkan proyek pengadaan pesawat Airbus dalam kurun 2005-2014 dalam program pengadaan 50 pesawat Airbus A330. Dalam keterangan sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan, kasus ini terungkap setelah pihaknya bekerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau) dan Inggris (Serious Fraud Office).

Sebelumnya, Lembaga antikorupsi Inggris Serious Fraud Office (SFO) menemukan adanya konspirasi untuk tindak korupsi dan suap oleh Rolls-Royce di Cina, India, dan pasar-pasar lainnya. Rolls-Royce sudah meminta maaf 'tanpa syarat' atas kasus-kasus yang terjadi dalam rentang waktu hampir 25 tahun. Pengadilan Inggris memerintahkan produsen mesin jet itu untuk membayar denda dan biaya sebesar £497 juta (sekitar Rp 8,1 triliun) ke kantor SFO, lembaga yang pernah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan ini.

Dan produsen mesin jet terbesar dari Inggris, Rolls-Royce, sudah menyatakan akan membayar denda sebesar £671 juta (atau sekitar Rp11 triliun) untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan otoritas Inggris dan Amerika Serikat, termasuk dengan sebuah pihak Indonesia.

Contoh Kasus Dalam Penyimpangan Etika Bisnis Dan GCGPT Jamsostek Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jamsostek atas laporan keuangan 2011 dengan nilai di atas Rp7 triliun. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan dalam diskusi Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada empat temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jamsostek yang menyimpang dari aturan.

1. Jamsostek membentuk Dana Pengembangan Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22/2004.
2. Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai Rp36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan.
3. BPK menemukan Jamsostek belum menyelesaikan aset eks investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes (MTN). Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah eks jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai Rp72,25 miliar dan aset eks jaminan MTN PT Volgren Indonesia.
4. masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jamsostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposit belum sepenuhnya memadai. Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek. Pertama, Jamsostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan program JHT. Kedua, Jamsostek belum efektif dalam mengelola data peserta JHT.

Analisis: Dari contoh kasus di atas merupakan kasus penyimpangan laporan keuangan 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek. Oleh karena itu menurut saya kasus seperti ini haruslah segera diselesaikan tentunya dengan cara membenahi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Peristiwa ini yang diakibatkan karena kurang baiknya sistem good corporate governance, harapan agar dapat segera teratasi dan tidak dapat terulang kembali. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) juga harus dapat menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sehingga tercipta aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku.

Investor mempertanyakan kualitas tata kelola perusahaan atau (good corporate governance/GCG) PT Jasa Marga Tbk (JSMR).Sebab, perusahaan milik negara ini membiarkan salah seorang manajernya melakukan gratifikasi berupa motor gede (moge) Harley-Davidson kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, mengatakan JSMR memang telah mengabaikan prinsip good corporate governance.Sebab, kalau benar-benar dijalankan, tidak perlu gratifikasi.“Kalau GCG dijalankan, pasti JSMR sehat secara manajemen.Artinya, manajemen tidak takut diaudit oleh pihak mana pun.

Namun, kalau kemudian melakukan gratifikasi, berarti ada yang tidak sehat, apalagi untuk memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).Diperburuk lagi dengan mental korup oknum auditor BPK maka terjadilah gratifikasi,” kata Wayan saat dihubungi, Minggu (24/9).Menurutnya, sesuai undang-undang, direktur utama selaku pimpinan perusahaan merupakan penanggung jawab tertinggi perusahaan.

“Puncak penanggung jawab adalah direktur utama karena diduga melanggar Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang turut melakukan atau penyertaan juncto Pasal 11 atau Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), lembaga yang ditunjuk Otoritas Jasa keuangan (OJK) melakukan penilaian tata kelola perusahaan menurut ASEAN Governance Scorecard, mengungkapkan maraknya kasus korupsi di perusahaan milik negara karena kurang bagusnya GCG yang memenuhi standar internasional.

Salah satu standar GCG, perusahaan harus aktif dalam memerangi korupsi.Tampaknya langkah tersebut masih kurang masif dilakukan oleh perusahaan BUMN. Seharusnya, sebagai perusahaan yang sudah go public tak ada kamus bagi JSMR melakukan suap. Apalagi ada standar dari OJK dan BEI.

Pada perdagangan akhir pekan (22/9), harga saham JSMR merosot turun 100 poin atau 1,71 persen menjadi 5.750 rupiah. Saham Jasa Marga bergerak di kisaran 5.600-5.825 rupiah dengan volume perdagangan sebesar 12,7 juta. Bahkan, JSMR sempat jatuh hingga ke level 5.600 rupiah sebelumnya akhirnya kembali naik ke level 5.750 rupiah per saham.

Menurut Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, adanya suap yang dilakukan Jasa Marga otomatis menjadi sentimen negatif bagi pelaku pasar. “Hal ini mengindikasikan etika buruk dari perusahaan itu sendiri,” ujarnya.

Tim Khusus

Sebelumnya, Komisaris Utama Jasa Marga, Refly Harun, mengatakan kasus gratifikasi pemberian hadiah motor gede ini telah memberi dampak besar pada perusahaan. Terlepas apa motif Setia Budi dalam kasus tersebut, perusahaan tetap menganggap tindakan itu tidak bisa dibenarkan. “Itu kan bisa mengarah ke tindak pidana gratifikasi, suap, dari sisi administratif ya melanggar.

Dampaknya serius bagi perusahaan. Ini terkait image dan citra baik perusahaan,” ujarnya. Menurut dia, perusahaan langsung bertindak tegas dengan memberhentikan Setia Budi sebagai GM Jasa Marga Cabang Purbaleunyi. Posisinya pun sudah digantikan dan tugas pelayanan Kantor Cabang Jasa Marga di Purbaleunyi tidak terganggu. “Sudah diganti, sudah ada pejabat yang baru.

Pelayanan publik enggak ada masalah,” imbuhnya. Ke depan, tingkat disiplin pegawai akan difokuskan. Dengan menerapkan good corporate governance diharapkan citra perusahaan bisa kembali. “Agar tidak terjadi lagi maka kami membentuk tim khusus yang langsung di bawah dirut untuk mengkaji dan mengecek sejauh mana kepatuhan kepatuhan bagi tingkat cabang maupun kantor pusat terhadap praktik compliance,” katanya.

Berikut ini adalah contoh penerapan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia:..

1. PT BNI (Persero) Tbk

Analisa Penerapan Prinsip Transparansi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan pada pedoman pokok pelaksanaan transparansi perusahaan, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, maka Bank BNI telah melaksanakannya setiap tahunnya dengan menyediakan akses kepada *stakeholders* untuk mengakses laporan keuangan. Hal ini dapat kita dapatkan melalui *website* resmi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yakni www.bni.co.id. Selain itu kita dapat mengakses laporan keuangan triwulan I, II, III dan IV dalam media cetak yang telah bekerja sama dengan Bank BNI untuk menerbitkan laporan keuangan perusahaan.

Transparansi atas Informasi yang terkait dengan perusahaan dijelaskan secara terinci oleh Bank BNI. Hal tersebut merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh publik guna mendapatkan informasi-informasi penting mengenai perusahaan. Hal tersebut mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan *good corporate governance*, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sistem dan pelaksanaan GCG. Dalam pengungkapannya perusahaan telah melaksanakannya dengan baik, karena informasi tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau *website* resmi Bank BNI. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Bank, BAPEPAM-LK dan publik. Jadi dengan adanya Sekretaris perusahaan, juga akan mempermudah mendapatkan informasi terkait perusahaan bagi para pemangku kepentingan.

Analisa Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan pada pedoman diatas mengenai akuntabilitas pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk diwujudkan dengan kejelasan tanggungjawab masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Tugas dan wewenang masing-masing organisasi telah dibuat, dipaparkan dan dilaksanakan setiap tahunnya oleh semua insan Bank BNI sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan yang berpedoman sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.

Untuk meyakinkan bahwa masing-masing organ dalam organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan perannya dalam pelaksanaan GCG, Bank BNI memberikan informasi tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi. Menyusun tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris merupakan langkah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk menjaga kompetensi dari masing-masing anggotanya. Kemudian juga terwujud pada kebijakan mengenai kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan persyaratan. Bank BNI mendorong terciptanya GCG, pada setiap awal tahun seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai BNI wajib menandatangani Komitmen Pelaksanaan GCG. BNI juga senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan praktik terbaik GCG yang ada baik di tingkat nasional, regional dan internasional yang relevan dengan kondisi di Indonesia dan yang sesuai dengan kebutuhan praktik bagi BNI, sehingga praktik GCG di BNI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil pemeringkatan GCG yang dilakukan melalui *self assessment* maupun *third party assessment* oleh pihak independen menjadi *feedback* dalam memetakan dan meningkatkan praktik GCG di BNI berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan.

Perusahaan meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Hal ini diperkuat dengan adanya Pembinaan Keahlian dan Keterampilan pada semua insan BNI melalui Perencanaan Sumber Daya Manusia yang secara terencana tertuang dalam *Human Capital Transformation Roadmap*. Roadmap ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki *global capability*. Pengelolaan sumber daya manusia pada tahun 2012 dititikberatkan pada pengembangan kapabilitas sejalan dengan arah Bank untuk memperkuat landasan keuangan yang menjadi pondasi bagi pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki *global capability* maka dilakukan suatu inisiasi strategis pengelolaan sumber daya manusia yang difokuskan pada *capacity fulfillment* dan *capability enhancement*. Untuk mendukung inisiasi strategis tersebut telah dilakukan transformasi pada pengelolaan sumber daya manusia melalui penyempurnaan organisasi pada Divisi *Human Capital* yang terbagi menjadi 4 (empat) fungsi besaran yaitu *strategy*, *business partnering*, *expertise* dan *services*.

Dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya BNI juga menerapkannya melalui pemberian *reward* dan *punishment system* sesuai dengan prinsip GCG. Bank BNI membentuk komite khusus dalam pelaksanaan sistem ini, seperti adanya Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite *Anti Fraud*. Selain memberikan penghargaan kepada insan BNI yang berprestasi, juga memberikan sanksi kepada insan BNI yang melakukan tindak pelanggaran. Diharapkan dengan adanya sistem ini, insan BNI lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya.

Analisa Penerapan Prinsip Tanggung Jawab pada PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk

Prinsip Pertanggungjawaban PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ditunjukkan oleh insan BNI dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip GCG. Laporan keuangan disusun secara baik dan akurat, hal ini dibuktikan dengan Kebijakan Akuntansi yang dipakai oleh Bank BNI dalam Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI).

Dalam tanggung jawab atas komitmen manajemen, Bank BNI telah melakukan rapat Dewan Direksi setiap tahunnya, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi. Bidang-bidang yang dikaji dalam tersebut adalah Bidang Kepengurusan, Bidang Manajemen Risiko, Bidang Pengendalian Internal, dan Bidang GCG. Dalam rangka memenuhi kepatuhan

BNI telah melaksanakan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) secara terencana, terarah dan berkesinambungan agar mampu memberi manfaat jangka panjang sebesar-besarnya pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan CSR BNI meliputi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Pengembangan Sosial Kemasyarakatan), Pelestarian dan Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab produk, Kegiatan CSR oleh BNI Syariah.

Analisa Penerapan Prinsip Independensi pada PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk

Dalam rangka penerapan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, dan juga tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Bank BNI telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. Kewajiban ini dimuat dalam *code of conduct* tentang aktivitas politik yang dibuat oleh Bank BNI. Isi dari *code of conduct* tersebut menetapkan dengan sangat jelas bahwa seluruh insan BNI tidak diperkenankan mengikuti berbagai aktivitas politik.

Bank BNI juga memberikan informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris. Begitu juga dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Direksi juga mengatur hal tersebut. Selain itu, informasi lain juga dapat ditemui di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta *code of conduct* Bank BNI mengenai penanganan benturan kepentingan.

Guna memenuhi pelaksanaan independensinya, agar tidak saling mendominasi karyawan Bank BNI juga tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Pernyataan ini termuat dalam *code of conduct* perusahaan tentang pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi. Seluruh insan BNI juga telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, hal ini jelas terlihat dari Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG.

Analisa Penerapan Prinsip Kewajaran pada PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk

Berdasarkan pedoman diatas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memperhatikan kepentingan *stakeholder* dengan penyajian yang wajar tentang bagi hasil, pendapatan bank. Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, dilakukan dengan melaksanakan mekanisme atau tata cara penanganan yang telah disusun oleh Bank BNI. Dengan demikian jika terjadi suatu permasalahan mekanisme ini digunakan untuk memperjelas apa langkah yang dilakukan apabila ada suatu masalah terhadap karyawan.

Bank BNI memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Akan tetapi Bank BNI tidak menjelaskan secara detail mengenai hal ini.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan GCG Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan data di lapangan dan analisis peneliti, kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan penerapan *good corporate governance* antara lain:

- 1 Peraturan kredit perbankan akibat dari kondisi perekonomian global yang sedang menurun.
- 2 Produktivitas produk bank yang belum sepenuhnya efisien & efektif.
- 3 Standar SDM yang semakin lama semakin tinggi akibat dari era globalisasi.
- 4 Masalah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*). Walau semakin menurun tiap tahunnya, tetap menjadi perhatian khusus dalam praktik GCG.

2. PT Gudang Garam, Tbk

Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap laporan keuangan kinerja perusahaan cukup baik dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan pada rasio saham perusahaan menunjukkan tanda-tanda ketertarikan investor atas saham perusahaan.

Keputusan yang di ambil terhadap saham PT Gudang Garam, Tbk. adalah layak untuk dijual bagi investor yang telah memiliki saham tersebut karena saham PT Gudang Garam, Tbk. dihargai terlalu tinggi.

Perusahaan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas bisnis. Perusahaan berkomitmen untuk tidak menerima atau memberi suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau keuntungan lainnya yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan bisnis dalam arti kata PT. Gudang Garam, Tbk. Bersih. Setiap karyawan tidak

boleh menawarkan, membeli atau menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan atau dapat diartikan sebagai suap menurut hukum . setiap permintaan atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen.

Catatan akuntansi perusahaan dan dokumen pendukungnya harus secara tepat menjelaskan dan mencerminkan kondisi transaksi secara jelas. Tidak ada transaksi dana atau aset yang disembunyikan atau tidak dicatat. Semuanya akan dicatat serta dinukukan.

Kerjasama dan hubungan baik dengan pihak lain merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh perusahaan. Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Perusahaan juga mengharapkan para mitra bisnis tersebut mematuhi prinsip bisnis yang sejalan dengan prinsip bisnis perusahaan.

Perusahaan sangat menghargai keragaman dalam lingkungan kerja yang dilandasi oleh sikap saling percaya dan saling menghormati serta memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk kemajuan dan reputasi perusahaan. Perusahaan merekrut, memperkerjakan, dan mengembangkan para karyawannya atas dasar kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan bagi pekerja yang relevan. Perusahaan memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Perusahaan juga memandang karyawan sebagai mitra usaha yang utama, dan karenanya perusahaan bekerja sama dengan karyawan demi mengembangkannya dan memperkuat keterampilan dan kemampuan setiap individu. Perusahaan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui sarana yang tersedia dalam perusahaan.

Setiap Direktur, anggota Dewan komisaris dan semua karyawan perusahaan berkewajiban menghindarkan diri dari kegiatan atau kepentingan yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap perusahaan. Setiap Direktur, Komisaris atau karyawan yang terkait benturan kepentingan, wajib mengungkapkan keadaan benturan kepentingan tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh direksi / Dewan komisaris guna pengambilan keputusan lebih lanjut.

Klarifikasi dan penyelesaian atas hal-hal terkait dengan penegakan kode etik perusahaan dilakukan dan diputuskan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Klarifikasi dan penyelesaian atas hal-hal terkait kepatuhan karyawan terhadap kode etik perusahaan dilakukan dan diputuskan oleh Departemen Sumberdaya Manusia Perusahaan.

A. Analisis Fundamental

Hingga saat ini tiga perusahaan di sektor rokok yang telah listing di pasar modal Indonesia adalah Gudang Garam, H.M Sampoerna, dan British American Tobacco (BAT). Salah satu dari ketiga perusahaan tersebut yang paling menonjol dan menguasai pangsa pasar rokok terbesar di Indonesia adalah Gudang Garam. Hal ini disebabkan FT. Gudang Garam menerapkan strategi konvensional dimana proporsi hutangnya tergolong rendah. Selain itu didukung pula dengan likuiditas perusahaan yang sangat besar, maka tak heran bila perusahaan ini masih mampu berjaya di kancah dunia usaha Indonesia.

DIndonesia seperti laju inflasi, pertumbuhan PDB, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI, serta proyeksi keuangan lima tahun kedepan berdasarkan data laporan keuangan tahun 1995-2000. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh skenario mostlikely, dimana keadaan ekonomi masih buruk seperti sekarang ini maka pemerintah masih harus memerah cashcownya yaitu industri rokok sebagai penyumbang cukai terbesar. Dengan asumsi pemberlakuan cukai dan HJE dalam kurun lima tahun kedepan akan naik 100%, sedangkan PPn tetap maka Gudang Garam akan niengalami penurunan laba bersihnya akibat beban COGS yang cukup besar. Tetapi dengan merek yang kuat di pasar sehingga loyalitas konsumen telah terbentuk maka Gudang Garam masih mampu meningkatkan penjualannya agar labanya tetap tumbuh. Untuk itu perlu melakukan brandpositioning yang lebih baik lagi dengan gencar melakukan iklan di berbagai media. Economic value perusahaan lima tahun kedepan memiliki trend meningkat yang mencerminkan performa perusahaan makin membaik akibat kegiatan operasinya. Nilai wajar perusahaan menunjukkan diatas nilai pasar yang terjadi sehingga berposisi undervalue.

Pada skenario optimistik, pemerintah tidak menaikkan cukai, HJE dan PPn karena kondisi ekonomi membaik sehingga melonggarkan budgetary pressure pemerintah. Laba perusahaan melonjak tinggi akibat beban COGS yang ditanggung perusahaan kecil. Economic value perusahaan dalam lima tahun kedepan membumbung tinggi yang menandakan kinerja perusahaan dari aktifitas operasinya sangat baik. Nilai wajar perusahaan jauh diatas nilai pasar yang berlaku sehingga saham perusahaan undervalue. Untuk itu Gudang Garam perlu melakukan ekspansi kapasitas produksinya dan menciptakan variasi produk baru seperti rokok A-Mild.

Pada skenario pesimistik, ternyata budgetary pressure memaksa pemerintah untuk menaikkan cukai dan HJE yang sangat i-inggi (>100%) dalam lima tahun kedepan, yang berdampak pada berkurangnya laba bersih perusahaan akibat beban COGS yang teramat besar dan bahkan menimbulkan kerugian. Dengan kondisi HJE yang demikian linggi dikombinasi dengan rendahnya daya beli masyarakat maka tingkat penjualan dan pangsa pasarnya akan menurun tajam. Economic value perusahaan lima tahun kedepan mengalami penurunan yang signifikan tiap tahunnya, yang berarti kinerja perusahaan dari kegiatan operasinya memburuk dan mengalami kerugian besar. Sedangkan nilai wajar perusahaan jauh dibawah nilai pasar yang terjadi sehingga posisi saham perusahaan overvalue. Untuk itu perusahaan perlu menekankan penguatan merek bagi produk kelas duanya yaitu SKT GG Merah karena harga yang lebih terjangkau.

Dengan hasil skenario diatas maka investor dapat dengan peka membaca pola yang akan terjadi, apakah menguntungkan atau tidak. Sehingga para investor dapat mengambil keputusan dalam membeli saham Gudang Garam. Mengingat kondisi saat ini dimana likuiditas perusahaan yang overlikuid, maka Gudang Garam sebaiknya menerapkan strategi yang tidak konvensional, sehingga lebih aktif memutarakan kelebihan cash yang ada untuk ditanamkan pada investasi yang menguntungkan. Selain itu dijadikan sebagai peluang untuk menciptakan inovasi produk baru (rokok A-Mild) untuk dapat menghadapi persaingan di masa datang.

3. PT Timah (Persero) Tbk

Kebijakan pokok Perusahaan merupakan prinsip-prinsip utama dalam mendukung proesata kelola, pengaturan dan pengelolaan Perusahaan.

1. Integritas Bisnis

Lingkup kegiatan usaha Perusahaan yang sangat erat bersinggungan dengan masyarakatsekitar maupun lingkungan mengharuskan diterapkannya standar etika tersebut. Standar etika yang diterapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG dan Budaya Perusahaan yang dikenal dengan 3K (Kebersamaan, Keterbukaan dan Kebersihan).

Dengan semakin berkembangnya lingkungan usaha menyadarkan Perusahaan untuk pentingnya secara aktif berperan dan bertindak sebagai korporasi yang menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab. Disadari sepenuhnya oleh Perusahaan bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai jika integritas bisnis selalu dijaga dan ditingkatkan dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Perusahaan selalu mendorong agar seluruh Insan Perusahaan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya bagi Perusahaan.

2. Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi

Keuangan Perusahaan harus dikelola secara professional (tertib, taat pada peraturan & RKAP, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab) dengan mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian, dan mencerminkan pengelolaan aktiva dan kewajiban yang seimbang. Peraturan, kebijakan serta prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun biaya harus disusun dan direview dengan memperhatikan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai cerminan sistem pengendalian internal yang baik.

Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya, *profit oriented*, dan *fundmanagement* yang baik serta mempertimbangkan risiko. PT Timah (Persero) Tbk memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan asset yang terjadi. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. Transaksi keuangan tersebut telah mendapat persetujuan dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan.

PT Timah (Persero) Tbk selalu memastikan kebijakan dan peraturan terkait denganakuntansi merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

PT Timah (Persero) Tbk mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan berbagaiinformasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan secara benar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan menetapkan kebijakan terkait dengan standar akuntansi sebagai berikut:

- a) Selalu memperbaiki akuntansi yang dimiliki agar selalu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dibakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- b) Setiap jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan kebijakan Perusahaan bidang keuangan secara konsisten.
- c) Setiap jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu dalam semua jurnal.
- d) Setiap jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai kebijakan klasifikasi informasi Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Risiko

PT Timah (Persero) Tbk menyadari sepenuhnya bahwa pengelolaan risiko sangat penting dilakukan mengingat industri tambang merupakan industri dengan tingkat kemungkinan terjadinya risiko kesehatan dan keselamatan kerja, risiko lingkungan serta risiko usaha yang sangat besar jika tidak dikelola dengan baik. Sistem Manajemen Risiko selalu dikembangkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko serta memperbesar kemungkinan pencapaian sasaran yang hendak dicapai Perusahaan.

- a) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
- b) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- c) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan :
 - 1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi.
 - 2) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- d) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.
- e) Sistem Manajemen Risiko yang dikembangkan Perusahaan dilakukan secara terintegrasi di tingkat korporat dan berbasis teknologi informasi.

Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan Perusahaan meliputi:

- a. Menetapkan Konteks Risiko
- b. Identifikasi Risiko
- c. Analisa Risiko
- d. Evaluasi Risiko
- e. Penanganan Risiko
- f. Komunikasi dan Konsultasi Risiko
- g. Pemantauan dan Peninjauan Risiko

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

- a) Tanggung jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian dari visi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju dan tumbuh bersama.
- b) Perusahaan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan mengingat keberhasilan Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.
- c) Perusahaan harus mewujudkan kepedulian sosial dan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Perusahaan dan lingkungan terutama disekitar pusat operasi dan penunjangnya.
- d) Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Pengelolaan SDM

- a) Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan.
- b) Dalam pengelolaan SDM, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Karyawan untuk mampu memenuhi tuntutan perkembangan bisnis Perusahaan. Pengelolaan SDM ini meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan (Formasi), seleksi dan orientasi, penempatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian pekerja, program kesejahteraan dan pemberian *reward and punishment* secara berimbang.
- c) Pengelolaan SDM mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan dan berwawasan jangka panjang, sesuai arah kegiatan usaha perusahaan.

Pemeliharaan Keselamatan , Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Perusahaan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan yang didasari atas kesadaran bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima serta tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja.

Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perusahaan. Seluruh aktivitas Perusahaan dievaluasi secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan. Melalui praktik manajemen yang efektif, Perusahaan berupaya menjamin kesehatan dan keselamatan kerja Karyawan dan meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan sumbangsih positif kepada masyarakat.

SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Perusahaan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi dan evaluasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan melalui *assessment* oleh pihak eksternal maupun *self-assessment* sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Sosialisasi terhadap pihak internal dititikberatkan pada adanya pemahaman GCG dan timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang dilaksanakan Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG. Implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan secara konsisten dan menjadi tanggung jawab Direktur Pengembangan Usaha.

PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan Perusahaan untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan kepada Perusahaan secara pribadi, melalui surat, kotak pengaduan atau media lainnya yang disediakan oleh Perusahaan untuk kepentingan pelaporan pelanggaran. Penyediaan media tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan bukan untuk menyampaikan keluhan pribadi pelapor.

Setiap identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. Perusahaan akan memberikan penghargaan (*reward*) bagi pelapor, apabila pelanggaran yang dilaporkan benar-benar terjadi.

Perusahaan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, kecuali jika:

1. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
2. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini.
3. Diperlukan oleh Perusahaan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.

Pengaturan mengenai sistem pelaporan pelanggaran diatur lebih lanjut dalam Kebijakan tersendiri (*Whistleblowing System*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini.

4. PT. Aneka Tambang

Ayuningtyas Alamsyah, H24060094, Penilaian Harga Saham Pertambangan dengan Menggunakan Analisis Teknikal dan Fundamental. Di bawah bimbingan Farida Ratna Dewi Selama tahun 2009 investor kembali memburu saham pertambangan yang membuat indeks naik tajam. Sepanjang tahun 2009 pergerakan harga saham pertambangan dapat dikatakan sangat menarik. Saham-saham pertambangan memang menjadi saham unggulan pada tahun 2009 dengan rata-rata tingkat kenaikan harga saham sebesar 141,91%. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan pertambangan periode Januari-Desember 2009 yang terdaftar pada indeks Kompas 100 dengan menggunakan analisis teknikal,
2. Menganalisis kondisi perusahaan pertambangan yang terdaftar di indeks Kompas 100 periode Januari-Desember 2009 dengan menggunakan analisis fundamental selama tiga tahun terakhir (2006-2008).
3. Membandingkan nilai intrinsik harga saham perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di indeks Kompas 100 selama periode Januari - Desember 2009 dengan menggunakan analisis fundamental.
4. Mengidentifikasi faktor fundamental yang dapat mempengaruhi harga saham pertambangan.

Penelitian ini dilakukan di PT Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data time series harian dari bulan Januari sampai Desember 2009, serta data laporan tahunan perusahaan selama periode 2006-2008. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2007. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah Analisis teknikal dan Analisis fundamental. Dalam indeks Kompas 100 dipilih empat perusahaan. Perusahaan tersebut antara lain PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS). Melalui analisis teknikal, investor dapat mengamati pergerakan harga saham keempat perusahaan tersebut selama Januari-Desember 2009. Saham ANTM mengalami 6 titik golden cross dan 6 titik dead cross.

Saham BUMI mengalami 5 titik golden cross dan 4 titik dead cross. Saham PTBA mengalami 5 titik golden cross dan 4 titik dead cross. Saham TINS mengalami 3 titik golden cross dan 3 titik dead cross. Analisis fundamental PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan selama tahun 2006-2008 cenderung baik. Pada tahun 2007 ANTM melakukan stock split dengan rasio 1:5, sehingga jumlah saham beredar ANTM bertambah lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dan hal ini berpengaruh terhadap nilai EPS, EPS ANTM tahun 2007 sebelumnya Rp. 536,67 dan menjadi Rp 143,67 pasca stock split. Saham ANTM mengalami overvalued di pasar saham pada tahun 2009.

Kinerja PT Bumi Resources Tbk (BUMI) selama periode 2006-2008 tergolong baik, namun saham BUMI mengalami undervalued di pasar saham pada tahun 2009. Kinerja PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) selama tahun 2006-2008 cenderung baik, namun pada tahun 2009 saham PTBA mengalami undervalued di pasar saham. Sedangkan kinerja PT Timah Tbk (TINS) cenderung kurang memuaskan. Pada tahun 2008 TINS melakukan stock split dengan rasio 1:10, hal ini mengakibatkan jumlah saham beredar TINS bertambah sepuluh kali lipat. Bertambahnya jumlah saham beredar berpengaruh terhadap EPS pasca dilakukannya stock split, dan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa saham TINS mengalami overvalued di pasar saham.

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Pada Program CSR Antam

A. Transparansi (transparency)

Pada pelaksanaan Program CSR di PT Antam Tbk terlihat sudah terlaksananya transparansi tersebut, hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Sustainability Report dan PKBL Report, hal ini terungkap dari wawancara dengan Senior Manager CSR sebagai berikut: "Adanya laporan CSR (sustainability report) dan PKBL report yang kami buat sejak dari tahun 2005, serta mudahnya masyarakat dalam mengakses CSR Antam dari internet. Saya rasa itu dapat dengan mudah di pahami oleh masyarakat dan kami

sangat transparan.” Oleh karena itu dengan dibuatnya sustainability report di Antam setiap tahunnya merupakan bentuk dari transparansi program CSR, karena di dalam sustainability report terdapat laporan dari pelaksanaan program CSR selama satu tahun ada juga PKBL report dan kedua buku tersebut dapat dibaca oleh siapapun karena Antam menganut azas transparansi dalam pengelolaan CSR nya sesuai azas GCG. Azas transparansi itu diperkuat pula oleh mudahnya masyarakat dalam mengakses sustainability report dan PKBL report, baik melalui website di : www.antam.com maupun jika mitra binaan atau siapapun yang datang ke Antam untuk meminta bukunya juga dapat diberikan. Bahkan bentuk transparansinya dapat juga masyarakat luas mengakses Annual Report dari website tersebut, dan semua data yang disajikan oleh Antam merupakan hasil Audit jadi selain transparan juga independen bukan hanya untuk membangun image perusahaan, hal tersebut dilakukan karena Antam menganut azas GCG dengan kuat.

B. Akuntabilitas (accountability)

Dalam hal ini Antam sudah melaksanakan azas akuntabilitas bagi program CSR yaitu dengan dipublikasikannya pengelolaan alur pelaksanaan program kemitraan CSR Antam yang diharapkan dapat bermanfaat bagi stakeholders dan shareholders karena dengan demikian program CSR dapat terlaksana serta Antam juga melaksanakan BUMN Peduli sebagai wujud akuntabilitasnya terhadap Negara ini.

C. Responsibilitas (responsibility)

Adanya azas responsibility ini diterapkan pada Antam, karena pada buku laporan keberlanjutan perusahaan (sustainability report) dijelaskan komitmen Antam dalam melaksanakan CSR dijelaskan bahwa pada tahun 2008 adalah tahun yang penuh tantangan bagi Antam, dimana harga komoditas secara signifikan, khususnya untuk komoditas Nikel, dan krisis global yang memaksa perusahaan-perusahaan baja di berbagai Negara mengurangi produksinya sehingga penjualan bijih nikel maupun feronikel mengalami kelesuan, merupakan tantangan di sisi bisnis dan operasional yang harus dihadapi. Namun dalam kondisi seperti apapun Antam tetap melaksanakan tanggung jawabnya baik dalam mengelola lingkungan, serta mengembangkan masyarakat di daerah operasi karena hal tersebut tidak terpisahkan dari kegiatan operasional.

D. Independensi (independency)

Antam dalam menyusun program CSR nya tidak secara spontan dan bukan tanpa dasar perencanaan yang matang baik dari segi biaya maupun kegiatan, namun hal tersebut sudah direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan dan tidak bersifat kaku, pada PT Antam Tbk disebut dengan Master Plan. Hal ini dilakukan agar tidak ada dominasi dari pembuat program CSR di Antam dan tidak ada intervensi karena master plan dibuat berdasarkan hasil diskusi dan survey dari stakeholders.

E. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)

Program CSR Antam yang selama ini dijalankan oleh Antam telah mempengaruhi profit perusahaan oleh karena itu kepentingan pemegang saham dan juga kepentingan saham lainnya merasa tidak rugi untuk menyimpan sahamnya di Antam. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut; “Dalam kaitan dengan pelaksanaan CSR, Antam tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG termasuk azas fairness baik kepada pemegang saham (shareholder) maupun pemangku kepentingan (stakeholder). Kepada shareholder, dengan melaksanakan CSR yang baik, maka diharapkan perusahaan akan sustain dan penciptaan profit (yang sekaligus akan meningkatkan nilai pemegang saham) dapat berjalan dalam

jangka panjang. Sedangkan bagi stakeholder, program CSR yang baik akan meningkatkan tingkat kesejahteraannya.” Dengan dilaksanakannya program CSR dengan komitmen yang kuat sehingga berdampak pula pada pemegang saham serta masyarakat. Hal ini dipengaruhi dengan pelaksanaan program CSR sehingga profit perusahaan menjadi sustain sehingga pemegang saham percaya kepada Antam untuk menanamkan sahamnya di Antam. Selain itu, dampak di masyarakat adalah dengan adanya program ini sehingga masyarakat menjadi loyal dan percaya kepada Antam karena kehidupan mereka bisa dapat lebih terbantu dan lebih baik dari sebelumnya.